

Jalan Penghubung Ambles, Akses Bekasi-Kabupaten Bogor Terganggu

BEKASI (IM)- Jalan Pangkalan 1, Bantar Gerbang, Kota Bekasi, ambles menyusul cuaca ekstrem hujan deras yang melanda di wilayah penyangga Jakarta pada Minggu (7/11). Akibatnya akses jalan utama penghubung antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor pun terganggu. Pantauan di lokasi, jalan tersebut terlihat miring dari kondisi jalanan yang normal di sebelahnya. Sementara pada beberapa bagian terlihat bolong dan ambles sekitar lima meter.

Menurut Harto (24) warga sekitar, kondisi jalan sebelumnya memang sudah miring. Namun, diperparah dengan hujan lebat kemarin yang menyebabkan longsornya jalanan. "Sebelumnya cuma miring doang jalannya, itu awalnya satu-satunya tuju meter, kemarin miring terus tambah hujan gede jadi tambah longsor," kata Harto saat ditemui di lokasi, Senin (8/11).

Akibat amblesnya jalan, kini jalan tersebut pun telah dipasangi tali pembatas berwarna

kuning. Adapun hanya satu ruas jalan yang dipakai hingga menyebabkan kendaraan dari arah berbeda harus bergantian untuk melintas. "Pembatas ini baru kemarin dipasang, jadi langsung dipasang. Tadinya masih dua jalur bisa dipakai (dilintasi), baru sekarang sudah enggak bisa dua jalur lagi," tuturnya.

Harto berharap kondisi jalan segera diperbaiki. Menurutnya, kondisi amblesnya jalan membuat khawatir warga. Lebih lagi, tambah Harto, akses jalanan tersebut menjadi akses alternatif utama. Diungkapkannya, bahwa mobilitas pengendara sangat tinggi pada jam-jam produktif. "Pasti mengganggu untuk pengguna jalan dan khawatir namanya musibah enggak ada yang tahu kalau tiba-tiba longsor lagi," ucapnya.

Menurut dia, kemacetan terjadi pada pagi dan sore hari. "Jalanan ini ramai dan macet, kalau pagi sekitar jam 8 kalau sorenya jam 4," pungkasnya. ● yan

11 Kelurahan Kota Bogor Sepanjang Ciliwung Berpotensi Bencana

BOGOR (IM)- Sebelas kelurahan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung Kota Bogor rawan bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, 11 kelurahan yakni Kelurahan Kedung Halang, Cibogor, Gudang Pasir Jaya, Panaragan, Bondongan, Sukasari, Kelurahan Gunung Batu, Sukaresmi, Sempur, dan Kelurahan Tanah Baru.

"Ada 11 kelurahan itu berada di Kecamatan Bogor Tengah, Timur, dan Utara sepanjang Ciliwung paling rawan bencana banjir dan longsor," jelas Kepala Pelaksana BPD Kota Bogor, Teofilo Patrocino Fritas, Senin (8/11).

Ia mengatakan, secara keseluruhan 68 kelurahan di Kota Bogor berpotensi bencana, namun 11 tersebut bisa disebut langganan bencana. Hampir setiap tahun dan kejadiannya berulang.

Yafies menjelaskan, upaya pencegahan bencana kerap dilakukan. Selain membentuk forum bencana di tingkat kelurahan, BPBD juga melakukan

pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat dan simulasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko bencana. "Misalnya tanah longsor dan harus dibuatkan TPT (Tembok Penahan Tebing). Bila memang tidak mungkin lagi ditinggali, kami beri rekomendasi ke Disperumkim untuk direlokasi," paparnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar warga Kota Bogor, terutama di daerah rawan agar menyadari ketika hujan dengan intensitas tinggi agar bisa mengevaluasi diri sendiri. "Terutama hujan sudah mulai di atas setengah jam ke atas, biasanya suka terjadi banyak hal, harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Sehingga mengurangi risiko dari bencana," ujar Theo.

Laporan Minggu kemarin, hujan yang berlangsung selama berjam-jam di Kota Bogor menyebabkan 24 bencana di sejumlah titik. BPBD melaporkan 24 kejadian bencana terdiri dari 12 kejadian banjir lantasan, 9 longsor, dan tiga kejadian lagi pohon tumbang, tebing ambrol, dan pondasi retak. ● gio



IDN/ANTARA

LONGSOR DI DEPOK

Sejumlah warga melihat jalan yang longsor di Kawasan Pasir Putih, Depok, Jawa Barat, Senin (8/11). Hujan lebat yang mengguyur wilayah Pasir Putih Depok pada Minggu (7/11) tersebut menyebabkan terjadinya longsor yang mengancam permukiman warga di kawasan itu.

8 Nusantara



IDN/ANTARA

BADUT KAMPANYE PERCEPATAN VAKSIN

Komunitas Badut Tasikmalaya (Battik) menunggu giliran divaksinasi Covid-19 saat vaksinasi berlangsung di Mal Transmart, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (8/11). Kegiatan yang merupakan bagian dari kampanye Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Tasik Creative and Innovation Committee (TCIC) tersebut bertujuan untuk percepatan vaksinasi nasional, termasuk bagi anak usia 6-11 tahun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bidik Kebun Teh Bogor dan Cianjur

Rencananya, jika menemukan adanya kebun teh yang tidak dikelola dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional akan mengambil alih dan diserahkan pengelolaannya ke Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Bogor.

CISARUA (IM)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional membidik kawasan kebun teh di Kabupaten Bogor dan Cianjur. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional masih mencari lokasi kebun teh di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Cianjur yang tak dikelola dengan baik.

Rencananya, jika menemukan adanya kebun teh

yang tidak dikelola dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional akan mengambil alih dan diserahkan pengelolaannya ke Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Bogor.

"Saat ini Kementerian ATR/BPN masih mengidentifikasi lahan kebun teh yang tidak dikelola dengan baik, setelah teridentifikasi maka kami atas nama negara akan ambil alih hak guna usahanya (HGU)," ujar Direktur Jen-

deral Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, usai melakukan penanaman pohon di Kampung Cikoneng, Desa Tugu Utara, Cisarua, Senin (8/11).

Ayah tiga orang anak ini menambahkan selain di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Lahan HGU yang akan diambil alih kelola juga ada di Kabupaten Cianjur.

"Lahan HGU yang akan diambil alih kelola ada empat kecamatan di Kabupaten Bogor dan lima kecamatan lainnya di Kabupaten Cianjur," tambah Budi Situmorang.

Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra menambahkan, untuk menyelamatkan Kawasan Puncak dari kerusakan atau alih fungsi lahan, maka jajarannya akan mengkoordinir pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Langkah ambil alih kelola HGU kebun teh yang tidak dikelola dengan baik ini akan

kami lakukan, Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan berkordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Cianjur maupun lainnya," tutur Surya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyetujui langkah ambil alih ambil alih kelola HGU kebun teh yang tidak dikelola dengan baik, karena lebih untuk menyelamatkan Kawasan Puncak dan bagian dari mitigasi bencana alam.

"Akan adanya ambil alih fungsi lahan kebun teh maupun ruang terbuka hijau (RTH) lainnya tentunya harus dikembalikan fungsinya, kami tak mau bencana alam banjir terjadi di wilayah Jawa Barat karena daerah hulunya telah rusak," ucap Uu.

Sementara Bupati Bogor, Ade Yasin berharap bisa mempertahankan RTH yang ada yaitu 65 persen dari total luas lahannya. Diambil alih atau tidak HGUnya, saya meminta

lahan tersebut tetap menjaga peruntukan lahannya.

"Siapa pun pengelola HGUnya, kalau awalnya fungsi lahan hutan ataupun perkebunan, kami minta jika ada bangunan komersial apalagi tak berizin maka segera dikembalikan fungsinya," harap Ade.

Mantan advokat ini melanjutkan jika dipercaya oleh pemerintah pusat, bersama Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Bogor siap mengelola lahan HGU yang saat ini tak dikelola dengan baik.

"Kawasan Puncak saat ini semakin kritis karena terlalu dikomersialisasi dan demi pelestarian alam, kami siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan lainnya untuk mencapai tujuan penyelamatan Kawasan Puncak. Rencananya, selain mengembalikan fungsi lahannya, Pemkab Bogor akan memanfaatkan lahannya sebagai objek wisata alam," lanjutnya. ● gio

Warga Baduy Diajak Sukseskan Vaksinasi

LEBAK (IM)- Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wamby) mengajak warga Baduy Dalam dan Baduy Luar dapat menerima program vaksinasi untuk mencegah munculnya penyebaran gelombang ketiga Covid-19.

"Kita tidak henti-hentinya menyosialisasikan edukasi tentang bahaya Covid-19 pada warga Baduy, karena bisa menimbulkan kematian jika tidak divaksinasi," kata Ketua Wamby, Kasmin Saeni di Lebak, Senin (8/11).

Masyarakat Baduy yang tinggal di kaki Gunung Kendeng di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hingga kini belum semuanya menjalani vaksinasi. Padahal manfaatnya vaksinasi luar biasa, selain dapat mencegah penyebaran virus corona juga dapat membangun kekebalan komunal (herd immunity).

Apalagi, diprediksi akan terjadi gelombang ketiga Covid-19 pada pergantian tahun baru. Masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi maka tidak

menimbulkan sakit parah jika terserang Covid-19.

Manfaat vaksinasi lainnya, kata dia, juga dijadikan persyaratan untuk menerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Persyaratan vaksinasi juga dapat bergajian ke luar daerah, seperti naik angkutan Commuter Line. Karena itu, Wamby mengajak masyarakat Baduy agar sukseskan vaksinasi.

"Kami belum lama ini menggelar pelayanan vaksinasi yang melibatkan Paguyuban Urang Banten (PUB) untuk warga Baduy dan masyarakat perbatasan pemukiman Baduy," kata Kasmin yang juga pernah menjabat anggota MPR dari utusan adat Baduy.

Dia mengaku dirinya sudah keluar dari adat masyarakat Baduy yang tinggal di Kaki Gunung Kendeng. Namun, kecintaan terhadap Baduy tetap masih kuat, karena lahir dan besar sempat tinggal di pemukiman Baduy.

Bahkan, kata dia, ibu kandungnya pun masih warga Baduy

Luar atau Baduy Penamping.

"Kami minta semua warga Baduy dapat divaksinasi untuk kesehatan diri sendiri," ujarnya.

Tetua Adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jaro Sajja mengatakan, masyarakat Baduy berpenduduk 11.600 jiwa tersebar di 68 perkampungan mulai menerima vaksinasi guna mendukung program pemerintah.

Namun, pelaksanaan vaksinasi di masyarakat Baduy secara bertahap dan belum seluruhnya. Saat ini, kata dia, masyarakat Baduy Dalam pun menerima vaksinasi.

Kemungkinan besar masyarakat Baduy bisa menjalani vaksinasi, bahkan dirinya sebagai tetua adat juga Kepala Desa Kanekes sudah dua kali divaksin di Puskesmas Cisimeut. "Kami mendukung program vaksinasi guna mencegah Covid-19, sehingga ekonomi kembali pulih," terangnya. ● pra



IDN/ANTARA

PEMBERSIHAN PUNG PASCA BANJIR BANDANG

Relawan mengoperasikan alat berat untuk membersihkan material lumpur dan puing-puing rumah yang hancur akibat diterjang banjir bandang di Bulukerto, Batu, Jawa Timur, Senin (8/11). Sebanyak 1.750 personel dari TNI, Polri dan Relawan diterjunkan untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang di kawasan tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. SAYAGA WISATA BOGOR KABUPATEN BOGOR PERIODE 2021-2025

Berdasarkan:

- Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata Bogor.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris Dan Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Bogor.
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 539/388/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas / Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor

Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris PT Sayaga Wisata Bogor membuka kesempatan kembali kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi Anggota Dewan Komisaris PT Sayaga Wisata Bogor Kabupaten Bogor Periode 2021-2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

- Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang diligalsasi;
 - Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - membuat surat lamaran **DITULIS TANGAN** dan ditandatangani bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit;
 - bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
 - tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
 - membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi pengawasan PT Sayaga Wisata Bogor;
 - bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut, membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
 - membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas/Komisaris atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha PT Sayaga Wisata Bogor;

- membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
- membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif;
- membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang isinya menyatakan bersedia bekerja penuh waktu;
- membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota komisaris, atau diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar;
- Surat Pernyataan bermaterai sebagaimana pada Nomor 12,13,14,15,16,17,18 dan 19 dibuat secara terpisah untuk masing-masing pernyataan;

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- Persyaratan administrasi sebagaimana dimuat dalam angka 1 diatas dibuat sebanyak 2 (DUA) RANGKAP (1 (satu) Asli dan 1 (satu) Fotocopy) dan dimasukkan kedalam 1 (satu) amplop tertutup serta ditujukan kepada **KETUA PANITIA SELEKSI ANGGOTA KOMISARIS PT. SAYAGA WISATA BOGOR**;
- Panitia Seleksi hanya menerima pendaftaran melalui **PO. BOX 126 CIBINONG 16900** dan tidak menerima berkas lamaran secara langsung;
- Pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal **10 NOVEMBER 2021** sampai dengan **18 NOVEMBER 2021 (CAP POS)**;
- Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman/situs resmi pemerintah Kabupaten Bogor (www.bogor.go.id) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakan seleksi administrasi;
- Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Profesional;
- Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), pelamar harus mempresentasikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Pengawasan PT Sayaga Wisata Bogor.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Panitia Seleksi tidak menerima kelengkapan susulan, perbaikan dan/atau penggantian berkas lamaran yang sudah masuk sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal **18 November 2021 PUKUL 24.00 WIB (CAP POS)**;
- Bagi surat lamaran yang cap posnya melewati batas akhir masa pendaftaran sebagaimana huruf a, Panitia Seleksi tidak akan menerima surat lamaran tersebut;
- Kelalaian tidak mengikuti informasi hasil seleksi administrasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Cibinong, 9 November 2021

Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris PT Sayaga Wisata Bogor Kabupaten Bogor Periode 2021-2025

ttd

KETUA